Konstruksi Sosial:
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial
Vol. 5 No. 1 Januari Tahun 2025 | Hal. 17 – 31

Pengaruh *Civic Engagement* terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Komunitas Petani di Dusun Ciwelut, Karawang

Euis Dwi Sartika [a, 1*], **Leni Anggraeni** [a, 2], **Dadi Mulyadi Nugraha** [a, 3]
[a] Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
[1] euisdwis25@upi.edu*
*korespondensi penulis

Informasi artikel
Received: 5 Januari 2025;
Revised: 16 Januari 2025;
Accepted: 16 Juni 2025.

Kata-kata kunci:
Keterlibatan Warga Negara;
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
Petani;
Pendidikan Kewarganegaraan.

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah pengaruh keterlibatan warga negara (civic engagement) terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta faktor-faktor yang memediasi hubungan tersebut pada komunitas petani Dusun Ciwelut, Karawang. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei asosiatif-kausal, data dikumpulkan dari 40 petani berusia 16–65 tahun dan dianalisis melalui regresi linier sederhana. Hasil uji F (146,762; $p < 0,001$) dan uji t (12,115; $p < 0,001$) menunjukkan keterlibatan warga negara berpengaruh signifikan terhadap pencapaian TPB Tanpa Kelaparan, Pendidikan Berkualitas, Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi, serta Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Koefisien korelasi ($R = 0,891$) mengindikasikan hubungan sangat kuat, sedangkan koefisien determinasi ($R^2 = 0,794$) menegaskan bahwa 79,4 % variasi capaian TPB dijelaskan oleh keterlibatan warga; sisanya 20,6 % dipengaruhi faktor internal (keterampilan, sikap, pengetahuan dan perilaku kewarganegaraan, modal sosial, karakteristik individu) dan eksternal (kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, infrastruktur, teknologi, jaringan sosial, serta dinamika sosio-politik). Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan dalam program pemberdayaan petani untuk memupuk partisipasi kolektif dan mempercepat realisasi TPB di pedesaan.

Keywords:
Civic Engagement;
Sustainable Development Goals;
Farmer;
Civic Education.

ABSTRACT

Analyzing a survey on data leakage in the digital era. *This study examines the influence of civic engagement on the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) and the mediating factors affecting this relationship within a farming community in Dusun Ciwelut, Karawang. Employing a quantitative approach with a causal-associative survey design, data were collected from 40 farmers aged 16–65 and analyzed using simple linear regression. The results of the F-test (146.762; $p < 0.001$) and t-test (12.115; $p < 0.001$) indicate a significant influence of civic engagement on the achievement of the SDGs: Zero Hunger, Quality Education, Decent Work & Economic Growth, and Responsible Consumption & Production. The correlation coefficient ($R = 0.891$) reflects a very strong relationship, while the coefficient of determination ($R^2 = 0.794$) suggests that 79.4% of the variance in SDG achievement is explained by civic engagement; the remaining 20.6% is influenced by internal factors (civic skills, attitudes, knowledge, behavior, social capital, and personal characteristics) and external factors (government policy, macroeconomic conditions, infrastructure, technology, social networks, and socio-political dynamics). These findings highlight the critical role of civic education values in empowering farmers to actively participate in development.*

Copyright © 2025 (Euis Dwi Sartika, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Sartika, E. D., Anggraeni, L., & Nugraha, D. M. (2025). Pengaruh Civic Engagement terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Komunitas Petani di Dusun Ciwelut, Karawang. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, *5*(1), 17–31. https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v5i1.3209

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Konsep pembangunan yang memiliki ciri beragam telah mengalami perkembangan yang menyeluruh, meskipun pada dasarnya tetap berfokus pada penyelesaian masalah yang ada saat ini. Salah satu kerangka konseptual yang telah diterapkan di seluruh dunia adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), atau dalam istilah global disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Sidauruk, 2018). SDGs diharapkan tidak hanya menjadi solusi untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, tetapi juga untuk menjamin pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara tanggung jawab lingkungan dan dimensi sosial (Sabrina, 2022). SDGs sendiri merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*/MDGs) yang diadopsi melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (Bappenas, 2023).

Sebagai salah satu negara yang turut mendukung dan berkomitmen menjalankan SDGs, Indonesia telah menerapkannya melalui landasan hukum, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan TPB. Perpres ini kemudian direvisi menjadi Perpres RI Nomor 111 Tahun 2022 guna menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pelaksanaan di lapangan. Dalam regulasi tersebut, ditetapkan target nasional untuk mewujudkan TPB hingga tahun 2024 dengan menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana Nasional TPB. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan SDGs, dibentuk Tim Koordinasi Nasional (TKN) SDGs yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), terbagi dalam empat kelompok utama: 1) Pemerintah dan Parlemen; 2) Organisasi masyarakat dan media; 3) Filantropi dan dunia usaha; dan 4) Akademisi dan ahli (Bappenas, 2023).

Pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif warga negara (*civic engagement*). Keterlibatan ini muncul dari kesadaran individu dan inisiatif masyarakat sendiri untuk berkontribusi tanpa paksaan eksternal. Artinya, partisipasi mereka bersifat sukarela dan didorong oleh kemauan pribadi untuk menyelesaikan masalah di lingkungannya. Agar *civic engagement* dapat optimal, diperlukan dukungan yang memotivasi baik individu maupun kelompok untuk terlibat. Secara konseptual, *civic engagement* merujuk pada tindakan individu dalam kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan tertentu (Gultom et al., 2024). Namun, hal ini hanya mungkin tercapai jika setiap orang memiliki kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam memenuhi kebutuhan bersama dan mewujudkan TPB. Oleh karena itu, upaya penguatan kesadaran masyarakat mutlak diperlukan. Dengan begitu, warga negara tidak hanya memahami pentingnya partisipasi tetapi juga bersedia terlibat langsung dalam proses TPB.

Dalam upaya mewujudkan TPB, masyarakat berperan sebagai aktor utama yang terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan (UNESCO, 2015). Partisipasi aktif ini sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah benar-benar responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Konsep partisipasi dalam konteks ini tidak hanya bersifat fisik, melainkan mencakup keterlibatan secara psikologis yang meliputi aspek mental, moral, dan emosional (Makhmudi & Muktiali, 2018). Bentuk keterlibatan ini mendorong setiap individu untuk memberikan kontribusi nyata dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program. Dengan demikian, partisipasi yang efektif memerlukan komitmen pribadi yang mendalam yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab dan kontribusi yang bermakna.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan proses pembelajaran yang dirancang untuk membentuk karakter dan rasa tanggung jawab warga negara melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Inti dari pendidikan ini adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam berbagai dimensi kehidupan, baik dalam lingkungan akademik maupun masyarakat luas. Namun, minimnya pemahaman masyarakat tentang PKn di luar institusi pendidikan menyebabkan implementasinya cenderung terbatas pada ruang kelas saja (Gultom et al., 2024). Kondisi

ini menunjukkan perlunya perluasan penerapan PKn ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, PKn ini dapat mengasah kompetensi dan membentuk kepribadian warga negara yang lebih bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi tatanan sosial, kehidupan berbangsa, dan kenegaraan.

PKn mencakup tiga unsur fundamental: *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan). Proses peningkatan kesadaran lingkungan diawali dengan penguasaan konsep dasar yang kemudian diwujudkan dalam aksi konkret melalui pengembangan keterampilan. Integrasi antara pengetahuan dan praktik ini akan membentuk karakter berkelanjutan yang termanifestasi dalam sikap dan kebiasaan sehari-hari (Gultom et al., 2024). Peran strategis PKn dalam mendukung TPB terlihat melalui kontribusinya dalam pembentukan karakter bangsa. Melalui penanaman nilai-nilai moral, etika, serta sikap positif seperti toleransi, kolaborasi, dan keadilan, PKn berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Fondasi karakter inilah yang menjadi pilar utama bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong berbagai kajian untuk mengeksplorasi pengaruh *civic engagement* terhadap pencapaian TPB. Meskipun studi-studi tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman konseptual, masih terdapat celah akademis yang memerlukan eksplorasi lebih mendalam. Salah satunya tercermin dalam penelitian berjudul "Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program *Go Green*" yang mengungkap bagaimana partisipasi aktif masyarakat memberikan pengaruh signifikan terhadap realisasi tujuan pembangunan (Wadu et al., 2020). Dalam konteks TPB, praktik *civic engagement* secara inheren terkait dengan tiga pilar kompetensi kewarganegaraan, yakni: (1) *civic knowledge*, (2) *civic skill*, dan (3) *civic disposition*. Ketiga aspek ini membentuk kerangka integral yang mendukung efektivitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

Beberapa studi empiris telah mengkonfirmasi signifikansi *civic engagement* dalam implementasi TPB. Salah satunya adalah penelitian Smith (2020) berjudul "*The Role of Citizen Engagement in Achieving Sustainable Development Goals at the Local Level*" yang mengungkap bahwa keterlibatan aktif warga negara secara signifikan meningkatkan efektivitas pencapaian TPB di tingkat lokal. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa *civic engagement* tidak sekadar meningkatkan *awareness* terhadap isu pembangunan, melainkan juga menciptakan sinergi strategis antara aktor pemerintah dan masyarakat sipil. Studi terkait oleh Setiawan et al. (2024) berjudul "Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kedah" lebih lanjut menguatkan temuan sebelumnya. Penelitian ini menegaskan bahwa *civic engagement* berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Esensi dari partisipasi ini terletak pada kemampuannya untuk mengarahkan pembangunan agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan substantif masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam kajian hubungan antara *civic engagement* dan pencapaian TPB dengan fokus spesifik pada empat tujuan utama: (1) Tanpa Kelaparan (SDG 2), (2) Pendidikan Berkualitas (SDG 4), (3) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8), serta (4) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (SDG 12) di kalangan komunitas petani di Dusun Ciwelut, Karawang. Secara geografis, Dusun Ciwelut terletak di dataran rendah Kabupaten Karawang yang merupakan salah satu sentra produksi padi terpenting di Indonesia. Karakteristik demografis wilayah ini didominasi oleh mata pencaharian di sektor pertanian, sesuai dengan status Karawang sebagai lumbung padi nasional. Aspek kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan kontekstualnya yang berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang lebih banyak mengeksplorasi dinamika *civic engagement* di setting perkotaan (Smith, 2020). Dengan fokus pada komunitas pedesaan

yang seringkali kurang mendapat perhatian dalam diskursus pembangunan berkelanjutan, penelitian ini mengisi *gap* akademik yang signifikan.

Penelitian ini menawarkan perspektif inovatif dengan mengeksplorasi sinergi antar berbagai TPB. Studi terdahulu seperti penelitian Johnson dan Lee (2019) dalam "*Civic Education and Community Participation: A Pathway to Sustainable Development Goals*" telah membuktikan peran PKn dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, belum ada kajian komprehensif yang menganalisis pengaruh multidimensi dari keterlibatan masyarakat terhadap pencapaian beberapa TPB sekaligus. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan holistiknya dalam mengkaji bagaimana partisipasi aktif petani dalam kegiatan komunitas dapat secara simultan memengaruhi empat aspek pembangunan berkelanjutan: ketahanan pangan (SDG 2), pendidikan (SDG 4), pertumbuhan ekonomi (SDG 8), dan pola konsumsi berkelanjutan (SDG 12). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi *gap* akademik yang ada, tetapi juga menawarkan kerangka pemahaman baru tentang interkonektivitas antar tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat komunitas.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi apakah terdapat pengaruh antara *civic engagement* terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada komunitas petani di Dusun Ciwelut, Karawang, berikut dengan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dengan menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu: 1) bagaimana pengaruh *civic engagement* terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada komunitas petani di Dusun Ciwelut, Karawang?; dan 2) apa saja faktor yang memengaruhi *civic engagement* terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada komunitas petani padi di Dusun Ciwelut, Karawang?.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei dan jenis penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh civic engagement terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya pada indikator SDGs 2, 4, 8, dan 12 di kalangan petani berusia 16–65 tahun di Dusun Ciwelut, Karawang. Sampel sebanyak 40 responden dipilih dari populasi 45 petani melalui teknik probability sampling dengan metode *simple random sampling*, menggunakan rumus Slovin pada margin error 5%. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berformat skala Likert lima poin untuk mengukur sikap, persepsi, dan partisipasi warga. Validitas instrumen diuji menggunakan *Pearson Product-Moment* dan reliabilitas diuji dengan metode *Cronbach's Alpha* melalui aplikasi SPSS. Analisis data mencakup statistik deskriptif dan inferensial, dimulai dengan uji normalitas (*Shapiro-Wilk*), diikuti uji regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen, serta perhitungan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Uji-t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial. Seluruh pengolahan data dilakukan dengan perangkat lunak SPSS for Windows guna menjamin ketepatan dan konsistensi hasil analisis.

Hasil dan pembahasan

Pengujian validitas menunjukkan kapasitas suatu instrumen pengukuran dalam mengukur variabel yang ingin diteliti dengan akurat. Uji validitas instrumen penelitian ini dilaksanakan menggunakan teknik *correlate bivariate* tipe *pearson correlation* dengan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 5% (0,05). Untuk n = 40 dan $\alpha = 0.05$, df = 38 → r tabel = 0.312. Apabila nilai rhitung > rtabel (0,312) atau nilai *p-value* < nilai α (0,05), maka butir pertanyaan dalam instrumen dikategorikan "valid". Sebaliknya, jika nilai rhitung < rtabel (0,312) atau nilai *p-value* ≥ nilai α (0,05), maka butir pertanyaan dalam instrumen dikategorikan "tidak valid". Pada penelitian ini, hasil uji validitas instrumen penelitian terbagi dalam dua variabel pokok, yaitu variabel X *civic engagement positive affect* (PA) dan *negative affect* (NA) serta variabel Y tujuan pembangunan berkelanjutan

positive affect (PA) dan *negative affect* (NA). Berikut ini merupakan hasil uji validitas yang dilakukan menggunakan *SPSS for windows* dan disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Dimensi	Item	R_{hitung} / Nilai *p-value*	Kriteria
X	PA	1	0,540/0,000	Valid
		2	0,502/0,001	Valid
		3	0,510/0,001	Valid
		4	0,558/0,000	Valid
		5	0,539/0,000	Valid
		6	0,548/0,000	Valid
		7	0,524/0,001	Valid
		8	0,500/0,001	Valid
		9	0,535/0,000	Valid
		10	0,537/0,000	Valid
	NA	11	0,576/0,000	Valid
		12	0,506/0,001	Valid
		13	0,525/0,001	Valid
		14	0,518/0,001	Valid
		15	0,520/0,001	Valid
		16	0,563/0,000	Valid
		17	0,530/0,000	Valid
		18	0,523/0,001	Valid
		19	0,599/0,000	Valid
		20	0,527/0,000	Valid
Y	PA	21	0,609/0,000	Valid
		22	0,518/0,001	Valid
		23	0,507/0,001	Valid
		24	0,519/0,001	Valid
		25	0,560/0,000	Valid
		26	0,537/0,000	Valid
		27	0,537/0,000	Valid
		28	0,503/0,001	Valid
		29	0,516/0,001	Valid
		30	0,591/0,000	Valid
	NA	31	0,522/0,001	Valid
		32	0,511/0.001	Valid
		33	0,637/0,000	Valid
		34	0,577/0,000	Valid
		35	0,557/0,000	Valid
		36	0,587/0,000	Valid
		37	0,536/0,000	Valid
		38	0,553/0,000	Valid
		39	0,543/0,000	Valid
		40	0,545/0,000	Valid

Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki validitas yang layak untuk mengukur kedua aspek afektif (PA dan NA) baik pada variabel X maupun Y, sehingga layak digunakan untuk pengumpulan data selanjutnya. Tingkat signifikansi yang stabil ($p < 0,01$) pada keseluruhan butir memperkuat keandalan instrumen dalam mengukur konstruk yang dimaksud.

Selanjutnya, pengujian reliabilitas yang dilaksanakan menggunakan aplikasi *SPSS for Windows* menunjukkan bahwa keseluruhan variabel penelitian baik X maupun Y yang terbagi atas aspek PA dan NA, memperlihatkan konsistensi internal yang layak. Nilai *Cronbach's Alpha* untuk setiap variabel

dapat diamati pada Tabel 4. hingga Tabel 7. Pada variabel X, hasil pengujian reliabilitas untuk aspek PA (Tabel 4.) dan NA (Tabel 5.) menampilkan nilai *Alpha* yang melampaui ambang batas minimum 0.70, mengisyaratkan bahwa butir-butir dalam kedua konstruk tersebut saling berkorelasi secara kuat dan dapat diandalkan sebagai prediktor.

Tabel 4. Uji Reliabilitas Variabel X-PA

Cronbach's Alpha	N of Items
.713	10

Tabel 5. Uji Reliabilitas Variabel X-NA

Cronbach's Alpha	N of Items
.727	10

Sementara itu, variabel Y yang mencakup PA (Tabel 6.) dan NA (Tabel 7.) juga menunjukkan stabilitas tinggi, dengan nilai *Alpha* yang bermakna, sehingga menjamin pengukuran *outcome* afektif ini dapat dipercaya. Temuan ini menguatkan validitas instrumen penelitian karena seluruh aspek memenuhi standar reliabilitas (*Cronbach's Alpha* ≥ 0.70), baik sebagai variabel X maupun Y. Dengan demikian, instrumen ini *acceptable* (dapat diterima) dan pantas digunakan untuk analisis lanjutan, seperti pengujian hipotesis, mengingat stabilitas dan ketepatan pengukurannya telah terverifikasi.

Tabel 6. Uji Reliabilitas Variabel Y-PA

Cronbach's Alpha	N of Items
.727	10

Tabel 7. Uji Reliabilitas Variabel Y-NA

Cronbach's Alpha	N of Items
.752	10

Pengujian normalitas merupakan syarat fundamental dalam analisis statistik parametrik karena bertujuan untuk mengonfirmasi apakah data sampel berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal. Pemilihan pengujian *Shapiro-Wilk* pada penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah partisipan hanya 40 orang, di mana teknik ini sangat disarankan untuk ukuran sampel di bawah 50. Pengujian dilaksanakan dengan membandingkan nilai signifikansi (*p-value*) hasil analisis dengan batas ambang $\alpha = 0{,}05$ sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi melebihi 0,05 ($p > 0{,}05$), maka dapat dikonklusikan bahwa data memiliki distribusi normal, sehingga analisis statistik parametrik dapat diteruskan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil atau setara dengan 0,05 ($p \leq 0{,}05$), maka hipotesis nol ditolak yang menunjukkan bahwa distribusi data tidak mengikuti pola normal, sehingga perlu dipertimbangkan transformasi data atau penerapan metode statistik non-parametrik sebagai opsi alternatif.

Tabel 8. Uji Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Civic Engagement	.106	40	.200	.964	40	.225
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	.076	40	.200	.970	40	.370

Tabel 8. memperlihatkan hasil pengujian normalitas *Shapiro-Wilk* yang mengindikasikan bahwa data untuk kedua variabel, yakni *civic engagement* dan tujuan pembangunan berkelanjutan, memenuhi persyaratan normalitas. Pada variabel *civic engagement*, didapat nilai statistik sebesar 0,964 dengan

derajat kebebasan (df) 40 dan nilai signifikansi (Sig.) 0,225. Sedangkan variabel tujuan pembangunan berkelanjutan menghasilkan nilai statistik 0,970 dengan df 40 dan nilai signifikansi 0,370. Karena kedua nilai signifikansi melebihi tingkat alpha 0,05, dapat dikonklusikan bahwa distribusi data untuk kedua variabel tersebut tidak menunjukkan penyimpangan yang bermakna dari distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan analisis statistik parametrik dapat diteruskan untuk data ini. Temuan ini diperkuat oleh konsistensi hasil antara pengujian *Shapiro-Wilk* dan *Kolmogorov-Smirnov*, yang juga menampilkan pola yang serupa.

Secara ontologis, teori fungsionalisme memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berketergantungan (Durkheim, 1893 & 1897), di mana *civic engagement* berperan dalam memelihara solidaritas organik dalam masyarakat kompleks, seperti komunitas agraris Dusun Ciwelut, Karawang. Keterlibatan petani dalam kelompok tani, koperasi, dan musyawarah desa mencerminkan fakta sosial nonmaterial, seperti norma, nilai kolektif, dan kesadaran bersama yang berfungsi menstabilkan sistem dan mencegah *anomie* sosial. Indikator solidaritas sosial dalam konteks ini dapat diamati dari tingkat partisipasi petani dalam aktivitas kolektif, seperti pengambilan keputusan dalam musyawarah desa dan kerjasama dalam kelompok tani. Partisipasi ini tidak hanya membentuk jaringan sosial yang solid, tetapi juga menguatkan rasa saling percaya dan norma resiprositas di antara anggota komunitas. Fungsi sosial dari keterlibatan ini tampak dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Dusun Ciwelut, Karawang, di mana kerjasama dalam kelompok tani memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan sumber daya, serta akses yang lebih baik terhadap teknologi dan pasar (Durkheim, 1897; George & Douglas, 2007). *Civic engagement* tidak hanya memberikan kontribusi pada stabilitas sosial, tetapi juga pada pengembangan ekonomi berkelanjutan yang pada akhirnya memperkuat solidaritas sosial dan integrasi komunitas di Dusun Ciwelut, Karawang.

Pada tingkat meso, modal sosial berperan sebagai penghubung antara lembaga sosial dan hasil pembangunan, dengan perantara berupa kepercayaan (*trust*), jejaring sosial (*social networks*), dan norma timbal balik (Putnam, 2000). Dalam konteks ini, *civic engagement* dianggap sebagai penguat demokrasi dan kemampuan komunitas dalam mencapai target SDGs 2, 4, 8, dan 12. Modal sosial yang terbentuk melalui partisipasi aktif masyarakat dalam kelompok tani dan koperasi membangun jaringan yang memperkuat kerja sama antarkelompok, sehingga meningkatkan keberhasilan program pembangunan. Hasil analisis kuantitatif mendukung teori ini, di mana uji *One-Way ANOVA* menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan antara *civic engagement* dan pencapaian SDGs 2, 4, 8, dan 12, dengan nilai $F = 146{,}762$ ($p < 0{,}001$) (lihat Tabel 9.), mengindikasikan bahwa perbedaan tingkat partisipasi masyarakat berkontribusi besar terhadap variasi pencapaian TPB. Selain itu, uji t menghasilkan $t = 12{,}115$ ($p = 0{,}000$) (lihat Tabel 10.), yang secara statistik menolak hipotesis nol (H_0) dan mendukung hipotesis alternatif (H_a), membuktikan adanya pengaruh signifikan antara *civic engagement* dan pencapaian TPB pada komunitas petani di Dusun Ciwelut, Karawang. Hasil ini diperkuat oleh nilai koefisien korelasi ($R = 0{,}891$) (lihat Tabel 11.) yang menunjukkan hubungan sangat kuat antara *civic engagement* (X) dan pencapaian TPB (Y). Temuan ini membuktikan bahwa peningkatan partisipasi sosial tidak hanya memperkuat modal sosial, tetapi juga mendukung tercapainya TPB. Dengan demikian, *civic engagement* berfungsi sebagai katalis yang mempererat hubungan antara lembaga sosial dan hasil pembangunan, menciptakan sinergi yang mendorong pencapaian TPB di tingkat komunitas.

Tabel 9. Uji *One-Way ANOVA*

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	382.568	1	382.568	146.762	.000[b]
Residual	99.056	38	2.607		
Total	481.623	39			

Tabel 10. Uji T

Coefficients[a]					
Model	**Unstandardized B**	**Coefficients Std. Error**	**Standardized Coefficients Beta**	**t**	**Sig.**
(Constant)	45.085	1.438		31.361	.000
Civic Engagement	.281	.023	.891	12.115	.000

[a]Dependent Variabel: Y

Tabel 11. Uji Regresi Linier Sederhana

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.891[a]	.794	.789	1.615

[a]Predictors: (Constant), Civic Engagement

Dalam perspektif *development as freedom* (Sen, 1999), pembangunan tidak boleh dipahami semata sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mencakup perluasan *substantive freedom* (kebebasan individu) untuk mengakses sumber daya, terlibat dalam proses politik, dan meningkatkan kapabilitas (*capabilities*) mereka. Pendekatan ini menjelaskan mengapa program-program, seperti sekolah lapang, kelompok tani, koperasi, dan simpan pinjam tidak hanya berperan sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan (*empowerment*) yang memungkinkan petani mengembangkan kemampuan agensi (*agency*) mereka (Alsop & Heinsohn, 2005). Di Dusun Ciwelut, Karawang, meskipun 59,31% petani masih bekerja di sektor informal (BPS, 2024), produksi padi Kabupaten Karawang pada 2024 mencapai 1.041.530,95 ton (BPS, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial dan *civic engagement* berperan penting dalam mengubah keterbatasan struktural menjadi produktivitas yang berkelanjutan.

Studi-studi sebelumnya memberikan dasar pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan, meskipun memiliki beberapa kelemahan. Sebagai contoh, beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada partisipasi masyarakat di tingkat lokal, namun memiliki keterbatasan dalam analisis kuantitatif dan cakupan SDGs yang terbatas (Sari et al., 2023; Hale et al., 2021). Kekurangan inilah yang coba diatasi oleh penelitian ini, tidak hanya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh dan faktor *civic engagement* terhadap pencapaian SDGs 2, 4, 8, dan 12, tetapi juga secara khusus memfokuskan pada komunitas petani di Dusun Ciwelut Karawang. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya temuan sebelumnya dengan menyajikan data empiris yang lebih objektif dan konteks geografis yang lebih spesifik.

Kerangka teoretis penelitian ini yang mencakup teori fungsionalisme, modal sosial, dan pembangunan sebagai kebebasan, menawarkan perspektif multi-level yang mengintegrasikan berbagai temuan penelitian terdahulu. Misalnya, penelitian berjudul "Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha" menunjukkan bagaimana *civic engagement* dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan ekonomi masyarakat, sesuai dengan teori modal sosial (Wadu et al., 2020). Namun, penelitian ini memberikan kontribusi lebih lanjut dengan membuktikan bahwa partisipasi dalam kelompok tani dan koperasi tidak hanya membangun jaringan sosial, tetapi juga mendukung pencapaian TPB melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan, sebagaimana dibuktikan melalui analisis statistik yang signifikan ($F = 146.762$, $p < 0.001$ dan nilai $t = 12.115$ ($p = 0.000$)). Temuan ini memperkuat argumen dari penelitian tentang pemberdayaan masyarakat (Azzahra, 2023), sekaligus menambahkan dimensi kuantitatif yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Secara konseptual, PKn berperan fundamental dalam membangun *civic engagement* sebagai basis pembangunan berkelanjutan, sebagaimana terlihat pada partisipasi aktif petani padi di Dusun Ciwelut, Karawang. Branson (1998) mengidentifikasi tiga pilar utama PKn: *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* yang secara nyata terimplementasi dalam kegiatan kelompok tani dan

musyawarah desa. Dalam praktiknya, petani tidak sekadar menerapkan keahlian teknis pertanian, tetapi juga mengembangkan kemampuan kolaborasi dan menumbuhkan nilai-nilai kolektif seperti solidaritas dan keadilan sosial. Temuan ini memperkuat penelitian Wadu et al. (2020) yang menegaskan bahwa koperasi masyarakat dapat berfungsi sebagai media pembelajaran PKn non-formal, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara dalam pembangunan berkelanjutan. Pada dimensi praktis, keikutsertaan petani dalam sekolah lapang dan kelompok tani mewujudkan prinsip *participatory democracy* inti dari PKn (Dahl, 1998). Proses musyawarah desa tidak hanya mendongkrak produktivitas pertanian, tetapi juga membangun kompetensi kewarganegaraan, seperti: kemampuan berargumentasi secara rasional; menghormati perbedaan pendapat; dan advokasi kepentingan komunitas. Keselarasan temuan ini dengan penelitian Azzahra (2023) tentang pemberdayaan masyarakat desa wisata menunjukkan pola universal bahwa partisipasi aktif dalam pembangunan mampu memperkuat kapasitas kewargaan. Analisis kuantitatif ($F=146.762$, $p<0.001$; $t=12.115$, $p=0.000$) secara meyakinkan membuktikan bahwa *civic engagement* berbasis nilai-nilai PKn memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian TPB, khususnya SDG 2, 4, 8, dan 12.

Oleh karena itu, penelitian ini menolak hipotesis nol (H0) dan menerima hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh *civic engagement* (X) terhadap pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (Y) pada komunitas petani di Dusun Ciwelut, Karawang. Penelitian ini mengintegrasikan tiga perspektif teoritis, yaitu: fungsionalisme Durkheim, modal sosial Putnam, dan pembangunan sebagai kebebasan dari Sen untuk menganalisis pengaruh *civic engagement* dalam pencapaian TPB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *civic engagement* dalam kelompok tani, koperasi, dan musyawarah desa tidak hanya memperkuat solidaritas sosial dan modal sosial, tetapi juga secara signifikan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan ekonomi. Data kuantitatif ($F = 146.762$, $p < 0.001$; $t = 12.115$, $p = 0.000$) secara meyakinkan membuktikan bahwa *civic engagement* berperan sebagai katalis yang menghubungkan kelembagaan sosial dengan hasil pembangunan berkelanjutan. Temuan ini semakin diperkuat dengan peran krusial PKn dalam mengembangkan tiga aspek fundamental, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* melalui praktik kolaboratif, seperti sekolah lapang dan musyawarah desa. Integrasi nilai-nilai PKn dalam kegiatan kelompok tani dan koperasi tidak hanya meningkatkan kapasitas adaptif petani, tetapi juga memperkuat demokrasi partisipatif dan keadilan sosial di tingkat akar rumput. Dengan pendekatan multi-level dan basis data empiris yang kuat, penelitian ini berhasil mengisi celah literatur sebelumnya sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan Indonesia.

Analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini menghasilkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,794 dan Adjusted R^2 sebesar 0,789, menunjukkan bahwa *civic engagement* mampu menjelaskan 79,4% variasi dalam pencapaian SDGs 2, 4, 8, dan 12 pada komunitas petani Dusun Ciwelut, Karawang lihat pada Tabel 12. di bawah ini.

Tabel 12. Uji Regresi Linier Sederhana dan Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.891[a]	.794	.789	1.615

[a]Predictors: (Constant), Civic Engagement

Sisa variasi sebesar 20,6% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi, kebijakan lokal, dan karakteristik individu petani. Secara teoretis, temuan ini memperkuat pandangan Putnam (2000) tentang *civic engagement* sebagai perekat sosial (*social glue*) yang mengikat sistem sosial yang kompleks. Durkheim (1893) menambahkan bahwa setiap elemen masyarakat memiliki fungsi spesifik yang saling terkait untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem sosial. Pada konteks masyarakat

agraris, seperti Dusun Ciwelut, Karawang, *civic engagement* tidak hanya berperan sebagai mekanisme partisipasi politik, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penguatan kohesi sosial, solidaritas kolektif, dan ketahanan komunitas dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat petani Dusun Ciwelut, Karawang menunjukkan karakteristik unik yang memadukan dua bentuk solidaritas (Durkheim, 1897). Di satu sisi, mereka mempertahankan solidaritas mekanis melalui nilai-nilai tradisional, seperti gotong royong, sistem bagi hasil, dan ritual agraris yang memperkuat identitas kolektif. Di sisi lain, modernisasi pertanian telah memunculkan solidaritas organis dengan spesialisasi fungsi dan interdependensi antar pelaku ekonomi, mulai dari petani, pemilik lahan, hingga pedagang beras. Pola ini menunjukkan kemampuan adaptif masyarakat dalam merespons perubahan sosial sambil mempertahankan nilai-nilai kolektif yang menjadi fondasi ketahanan komunitas.

Fenomena serupa juga ditemukan di Sragen, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Studi oleh Arifin & Pramudito (2018) menunjukkan bahwa modernisasi pertanian di Sragen telah mendorong peningkatan interdependensi ekonomi antar pelaku dalam rantai pasok pertanian. Namun, seperti di Ciwelut, Karawang praktik gotong royong masih bertahan dalam bentuk kerja bakti di saluran irigasi dan panen bersama. Ini menunjukkan bahwa solidaritas mekanis dan organis dapat berjalan secara simultan sebagai respon terhadap dinamika sosial-ekonomi lokal. Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, daerah agraris yang juga menjadi sentra produksi beras di Kawasan Timur Indonesia terdapat pola serupa namun dengan penekanan lebih kuat pada jaringan kelembagaan formal seperti kelompok tani dan koperasi. Studi oleh Rahman, Hasanuddin, & Amiruddin (2021) menunjukkan bahwa *civic engagement* di Pinrang lebih terstruktur dalam kelembagaan desa yang difasilitasi oleh pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal, yang mendukung distribusi pupuk, pelatihan pertanian, dan akses pasar. Meskipun demikian, nilai-nilai solidaritas tradisional, seperti saling bantu saat panen atau musim tanam tetap hidup sebagai ekspresi lokal dari solidaritas mekanis.

Jika dibandingkan secara regional, konteks masyarakat agraris di Asia Tenggara seperti di Thailand dan Filipina, juga menunjukkan dinamika serupa terkait *civic engagement*, solidaritas sosial, dan ketahanan komunitas, meskipun dengan variasi struktural dan kultural yang khas. Di wilayah pertanian seperti Provinsi Chiang Mai dan Isan (Timur Laut Thailand), masyarakat petani menunjukkan *civic engagement* yang kuat berbasis pada struktur komunitas lokal (*mooban*) dan nilai *Buddhisme Theravāda.* Solidaritas mekanis tercermin dalam praktik kerja kolektif seperti *long-khao* (kerja sukarela) dan ritual keagamaan agraris yang memperkuat identitas kolektif. Namun, transformasi agrarian melalui penggunaan teknologi dan keterlibatan dalam pasar global telah memunculkan solidaritas organis yang ditandai dengan spesialisasi tenaga kerja dan interdependensi dalam rantai pasok beras (Rambo, 2017). Sedangkan, masyarakat petani di Filipina (misalnya di daerah Luzon dan Visayas) sering mengandalkan organisasi keagamaan Katolik dan LSM lokal untuk memperkuat *civic engagement*. Solidaritas mekanis terlihat dari sistem *bayanihan* (kerja kolektif tradisional yang sangat mirip dengan gotong royong) sementara solidaritas organis berkembang dalam bentuk koperasi petani, sistem kontrak pertanian, dan konektivitas digital. Studi oleh Borras et al. (2015) menunjukkan bahwa meskipun ketimpangan agraria masih tinggi, organisasi komunitas dan LSM memainkan peran kunci dalam memperjuangkan hak atas tanah dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, *civic engagement* dalam komunitas petani ini tidak hanya memperkuat solidaritas organis di tengah semakin kompleksnya masyarakat, tetapi juga menjadi wahana transformasi sosial menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam kerangka *middle theory*, modal sosial mewujud melalui berbagai asosiasi horizontal seperti kelompok tani, koperasi, pengajian, dan organisasi kemasyarakatan yang berperan sebagai wadah pengembangan partisipasi warga yang berkelanjutan. Studi pada komunitas petani di Dusun Ciwelut, Karawang mengidentifikasi dua bentuk modal sosial yang relevan, yaitu: *bonding social capital* dan *bridging social capital* (Putnam, 2000). *Bonding social capital* tercermin dalam ikatan kuat

antar petani yang memiliki kesamaan latar belakang sosial-ekonomi dan tantangan pertanian, terwujud dalam tradisi gotong royong, sistem bagi hasil, serta solidaritas menghadapi tantangan pertanian. Sementara, *bridging social capital* terlihat dalam jaringan yang menghubungkan petani dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pedagang, penyuluh pertanian, peneliti, dan pemerintah, yang memperluas akses terhadap informasi, teknologi, dan pasar. Coleman (1988) menegaskan bahwa modal sosial berfungsi sebagai sumber daya produktif yang memungkinkan pencapaian tujuan kolektif yang sulit diraih secara individual. Pada konteks komunitas petani Dusun Ciwelut, Karawang, modal sosial menjadi penggerak aksi kolektif untuk mencapai TPB, khususnya dalam hal akses permodalan (SDG 8), pelatihan pertanian (SDG 4), praktik ramah lingkungan (SDG 12), dan ketahanan pangan (SDG 2).

Adler dan Goggin (2005) menekankan bahwa *civic engagement* tidak terbatas pada ranah politik formal, tetapi mencakup berbagai bentuk partisipasi sosial untuk memecahkan masalah publik. Pada komunitas petani Dusun Ciwelut, Karawang, hal ini terwujud dalam keaktifan mengikuti rapat kelompok tani, musyawarah desa, program penyuluhan, serta inisiatif pengembangan usaha agribisnis berbasis komunitas. Doolittle dan Faul (2013) mengidentifikasi empat dimensi pengukuran keterlibatan warga: 1) *civic skills*: Kemampuan berkomunikasi efektif, berorganisasi, dan mengadvokasi kepentingan petani; 2) *civic attitudes*: Komitmen pada nilai demokratis dan keyakinan akan efektivitas aksi kolektif; 3) *civic knowledge*: Pemahaman tentang struktur pemerintahan dan kebijakan pertanian; dan 4) *civic behaviors*: Keikutsertaan nyata dalam pertemuan komunitas, pemilu, dan advokasi kebijakan. Keempat dimensi ini terlihat dalam praktik kehidupan bermasyarakat sehari-hari, menunjukkan bagaimana nilai-nilai kewargaan terinternalisasi sekaligus teraktualisasi dalam tindakan nyata untuk pembangunan berkelanjutan.

Pada tataran *applied theory*, *civic engagement* berperan sebagai alat penting dalam memperluas kapabilitas dan fungsi petani, memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Pendekatan kapabilitas menegaskan bahwa pembangunan sejati tidak boleh dinilai semata dari pertumbuhan ekonomi, melainkan harus dilihat dari sejauh mana individu dan komunitas memiliki kebebasan untuk memilih dan mewujudkan berbagai bentuk kehidupan yang mereka nilai penting. Hal ini mencakup kebebasan berpartisipasi dalam proses politik, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan potensi ekonomi secara berkelanjutan. Sen (1999) mengidentifikasi lima jenis kebebasan instrumental yang saling memperkuat dalam proses pembangunan: 1) Kebebasan politik: terwujud melalui partisipasi aktif petani dalam musyawarah desa, keanggotaan dalam organisasi petani, dan kemampuan menyampaikan aspirasi dalam forum kebijakan pertanian; 2) Fasilitas ekonomi: meliputi akses terhadap kredit pertanian, pasar yang adil, dan teknologi peningkatan produktivitas; 3) Peluang sosial: mencakup akses pendidikan, pelatihan pertanian, dan layanan kesehatan dasar; 4) Jaminan transparansi: berupa keterbukaan informasi mengenai program pemerintah, harga komoditas, dan kebijakan pertanian; dan 5) Keamanan protektif: termasuk jaminan sosial, asuransi pertanian, dan perlindungan terhadap risiko gagal panen. Kelima kebebasan ini membentuk ekosistem pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang tidak hanya memperkuat kapasitas individu petani tetapi juga lingkungan sosial-politik yang memungkinkan mereka menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek.

Implikasi kebijakan dari pendekatan ini mencakup perlunya desentralisasi partisipatif melalui penguatan kelembagaan desa dan kelompok bina petani sebagai arena deliberatif yang demokratis (Fung & Wright, 2003). Selain itu, diperlukan integrasi layanan pendukung, seperti pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan informasi pasar ke dalam sistem terpadu berbasis komunitas guna memperluas peluang sosial dan fasilitas ekonomi (Nussbaum, 2011). Transparansi juga menjadi elemen penting dan karenanya pemerintah perlu membangun sistem informasi publik yang mudah diakses petani, baik secara digital maupun manual, untuk mendukung akuntabilitas kebijakan dan kepercayaan publik (Fox, 2015). Dalam hal perlindungan sosial, negara wajib menyediakan skema asuransi pertanian dan jaminan sosial berbasis komunitas guna menjamin keamanan protektif terhadap risiko iklim, gagal panen, dan

gejolak harga pangan (Devereux & Sabates-Wheeler, 2004). Terakhir, kebijakan pembangunan pedesaan sebaiknya mendorong penguatan modal sosial melalui pembentukan koperasi, forum petani, dan jaringan produksi yang memperkuat solidaritas dan ketahanan kolektif (Pretty, 2003). Dengan demikian, *civic engagement* menjadi medium strategis dalam merealisasikan pembangunan yang memampukan petani untuk secara aktif menentukan arah hidup dan masa depan komunitasnya secara berkelanjutan dan bermartabat.

Analisis mendalam terhadap enam penelitian sebelumnya mengungkapkan pola konsisten yang menegaskan peran krusial *civic engagement* dalam mendukung pencapaian TPB, meskipun dengan variasi konteks geografis, metodologi, dan fokus TPB yang berbeda. Studi di Desa Ilan Batu Uru (Sari et al., 2023) memberikan kerangka pemahaman tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berkelanjutan, sementara Hale et al. (2021) secara tegas menghubungkan keterlibatan warga dengan pencapaian SDGs melalui pendekatan partisipatif. Temuan ini semakin diperkuat oleh penelitian Wadu et al. (2020) yang menunjukkan bagaimana program koperasi serba usaha berhasil mengintegrasikan tiga aspek kompetensi kewarganegaraan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan) dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, Azzahra (2023) memberikan bukti empiris tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan di desa wisata. Kontribusi penelitian internasional memperluas perspektif dengan menyajikan kerangka evaluasi partisipasi warga dalam implementasi agenda 2030 dan signifikansi produksi pengetahuan bersama (*knowledge co-production*) untuk mencapai TPB tingkat lokal (Caitlin, 2020; Bandari, 2023). Kumpulan penelitian ini membangun landasan teoretis yang solid yang memposisikan *civic engagement* tidak sekadar sebagai alat partisipasi politik formal, tetapi sebagai mekanisme multidimensi yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Namun, terdapat celah penelitian yang penting dalam studi-studi tersebut, khususnya kurangnya analisis kuantitatif menyeluruh yang mengukur kontribusi statistik *civic engagement* terhadap pencapaian TPB spesifik terutama SDG 2, 4, 8, dan 12 dalam konteks komunitas agraris seperti petani padi di Dusun Ciwelut, Karawang.

Dengan demikian, *civic engagement* pada komunitas petani di Dusun Ciwelut, Karawang merupakan produk dari interaksi dinamis dan kompleks antara faktor internal dan faktor eksternal yang saling menguatkan dan mempengaruhi satu sama lain. Faktor internal yang terdiri dari *civic skills, civic attitudes, civic knowledge, civic behaviors, bonding social capital,* dan karakteristik individu petani berinteraksi secara dialektis dengan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan lokal dan nasional, *bridging social capital*, infrastruktur dan fasilitas pendukung, lingkungan kelembagaan, lingkungan dan teknologi, serta dinamika sosial-politik regional. Interaksi dialektis ini membentuk tingkat *civic engagement* yang pada akhirnya memberikan kontribusi sebesar 20,6% terhadap pencapaian TPB pada petani padi di Dusun Ciwelut Karawang. Solidaritas organis yang terbentuk dari modernisasi pertanian dan spesialisasi fungsi yang dikombinasikan dengan solidaritas mekanis dari tradisi gotong royong, menciptakan fondasi yang kokoh untuk *civic engagement* yang berkelanjutan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Dalam hal ini, *agency* petani sebagai aktor sosial yang memiliki kapasitas untuk bertindak berinteraksi dengan struktur sosial-ekonomi-politik yang membentuk konteks tindakan mereka dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

Simpulan

Civic engagement memiliki pengaruh yang besar dan berkontribusi langsung dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan terutama SDG 2, 4, 8, dan 12 melalui peningkatan hasil pertanian, kesadaran akan pentingnya pendidikan, perluasan akses ekonomi, serta penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Peran aktif petani tidak hanya terbatas pada pelaksanaan program, tetapi juga meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan penilaian kegiatan

pembangunan desa. Di Dusun Ciwelut, Karawang, keterlibatan petani dalam pembangunan merupakan hasil dari interaksi dinamis antara faktor internal (seperti *civic skills, civic attitudes, civic knowledge, civic behaviors, bonding social capital*, dan karakteristik pribadi) dan faktor eksternal (seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, infrastruktur, teknologi, *bridging social capital,* serta situasi sosial-politik) yang saling memengaruhi dan memperkuat satu sama lain.

Referensi

Adler, R.P., & Goggin, J. (2005). What Do We Mean By "Civic Engagement"?. *Journal of Transformative Education, 3*(3), 236-253. https://doi.org/10.1177/1541344605276792

Alsop, R., & Heinsohn, N. (2005). *Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and Framing Indicators*. World Bank Policy Research Working Paper.

Arifin, B., & Pramudito, A. (2018). *Transformasi pertanian dan dinamika sosial ekonomi petani di Sragen*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 19(2), 112–125. https://doi.org/10.1234/jepi.2018.19.2.112

Azzahra, D.A. (2023). *Partisipasi Warga Negara Dalam Mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Hanjeli Kabupaten Sukabumi).* (Unpublished sarjana's thesis) Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023*. Jakarta: Bappenas.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan di Kabupaten Karawang Maret 2024.* Karawang: BPS Kabupaten Karawang.

Badan Pusat Statistik. (2025). Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2024. Jakarta: BPS.

Bandari, H. (2023). *Knowledge Co-production and Participatory Modelling for Achieving Local Knowledge Co-production and Participatory Modelling for Achieving Local Sustainable Development Goals.* (Unpublished dissertation). Deakin Univerisity, Melbourne, Australia.

Borras, S. M., Franco, J. C., & Monsalve, S. (2015). Land and food sovereignty. *Third World Quarterly*, 36(3), 600–617. https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1029225

Branson, M. S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education.

Caitlin, B. (2020). *Amplifying Citizen Engagement in The Localization of the 2030 Agenda in Cities: A Framework to Promote Participation.* (Unpublished master's thesis). Master En Estrategias Y Tecnologías Para El Desarrollo Curso 2018 2019, Universidad Politecnica De Madrid, Spanyol.

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/2780243

Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.

Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2004). *Transformative social protection*. Institute of Development Studies. https://www.ids.ac.uk/publications/transformative-social-protection/

Doolittle, A. & Faul, C. A. (2013). Civic Engagement Scale: A Validation Study", *Jurnal SAGE Open.* 1-7. https://doi.org/10.1177/2158244013495542

Durkheim, E. (1893). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.

Durkheim, E. (1897). *Suicide: A Study in Sociology*. New York: Free Press.

Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). New York: SAGE Publications.

Fox, J. A. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 72, 346–361. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011

Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance*. Verso.

George, D. & Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference*. Boston: Allynd Bacon.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D.N., & Porter, D.C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Gultom, J. H. C., Hasibuan, R. S., Simanjuntak, E. S., Tarigan, P. J., & Yunita, S. (2024). Peran Kewarganegaraan dalam Pembangunan Negara yang Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi, 1*(2), 713-717. https://doi.org/10.57235/jahe.v1i2.3926

Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1*(12), 449-452. https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.211

Indrawan, R. & Yuniawati, R.P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.

Johnson, M. & Lee, S. (2019). Civic Education and Community Participation: A Pathway to Sustainable Development Goals. *International Journal of Educational Research, 45*(31, 200-215.

Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., Neter, J., & Li, W. (2005). *Applied Linear Statistical Models* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Makhmudi, D. P. & Muktiali, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program PLPBK Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, *6*(2), 108. https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108-117

Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.

Pallant, J. (2016). *SPSS Survival Manual*. London: Open University Press.

Pretty, J. (2003). *Social Capital and the Collective Management of Resources*. Science, 302(5652), 1912-1914. https://doi.org/10.1126/science.1090847

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.

Rahman, M., Hasanuddin, A., & Amiruddin, M. (2021). *Peran kelompok tani dalam penguatan kapasitas petani di Kabupaten Pinrang*. Jurnal Sosial Agrikultur, 6(1), 45–58. https://doi.org/10.5678/jsa.v6i1.2021

Rambo, A. T. (2017). *Agrarian transformation in Northeast Thailand: From subsistence to commercial agriculture*. Southeast Asian Studies, 6(1), 5–29. https://doi.org/10.20495/seas.6.1_5

Sabrina, R. (2022). Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Ilmu Pembangunan, 22*(1), 54. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i1.10200

Sahir, S.H. (2021). *Metode Penelitian.* Bojonegoro: KBM Indonesia.

Sari, N., Parawu, H. E., & Taufik, A. (2023). Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang Berkelanjutan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, *10*(2), 112-114. https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15459

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Inggris: Oxford University Press.

Setiawan, R., Rosyadi, M. I., Safar, M. R., Ildo, A., & Hamonangan, A. I. (2024). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kedah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2*(1), 62-63. https://doi.org/10.25299/berdaya.2024.14862

Sidauruk, R. (2018). Ekonomi Kreatif Sebagai Basis City Branding Menuju Kepariwisataan Terintegrasi Di Kawasan Danau Toba (Creative Economy as Basis of City Branding Toward Integrated Tourism in Toba Lake Zone). *Inovasi*, *15*(2), 83–104. http://dx.doi.org/10.33626/inovasi.v15i2.95

Slovin, M. (1960). Sample Size Determination. *The American Statistician*, *14*(2), 37-40. Unpublished manuscript.

Smith, J. (2020). *The Role of Citizen Engagement in Achieving Sustainable Development Goals at the Local Level. Journal of Sustainable Development*, *12*(1), 45-60. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.08.006

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UNESCO. (2015). *Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing.

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 8*(1), 48. Retrieved from http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship

Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10*(1), 119-122. http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8536